

LKJ

LAPORAN KINERJA TAHUN

2019



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU SATU PINTU
PAINAN, JUNI 2019

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadiran Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Tahun 2019 telah dapat diselesaikan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan menyajikan hasil pelaksanaan program/kegiatan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu pada tahun 2019 dan merupakan tahun pelaksanaan Renstra Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan Periode 2016-2021.

Laporan ini menyajikan Kebijakan Penanaman Modal, Rencana Kerja dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu. Sejumlah capaian kinerja yang ditargetkan dalam rencana kerja dan dituangkan dalam Penetapan Kinerja (TAPKIN) telah berhasil dicapai dan bahkan melampaui target yang telah ditetapkan.

Kami menyadari bahwa penyusunan laporan ini masih banyak kekurangannya, namun demikian laporan ini akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun berikutnya.

Painan, Desember 2019
Kepala Dinas



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2019 Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPPPTSP) Kabupaten Pesisir Selatan, merupakan perwujudan pertanggungjawaban Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu kepada Bupati Pesisir Selatan dan kepada publik untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kewenangannya sebagai lembaga teknis daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi untuk meningkatkan investasi di Kabupaten Pesisir Selatan.

Sesuai dengan Rencana Kinerja (RKT) Tahun 2019 sebagai penjabaran tahunan dari Rencana Strategik (RENSTRA) Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu 2016-2021 telah ditetapkan indikator kinerja sasaran yang harus dicapai. Sesuai dengan dokumen Penetapan Kinerja Perubahan Tahun 2019 ditetapkan 2 sasaran strategis dengan 4 indikator kinerja yang akan diwujudkan dalam tahun 2019 dengan rincian sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perizinan
2. Terwujudnya Iklim Investasi yang Kondusif

Hasil pengukuran kinerja pada masing-masing indikator kinerja sasaran Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2019 sebagai berikut :

1. Terpenuhinya Standar Minimal Sarana dan Prasarana Pelayanan mencapai 65% dari target yang ditetapkan.
2. Meningkatkan Kualitas SDM Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan mencapai 65% dari target yang ditetapkan.
3. Meningkatkan Kualitas Penyajian Informasi Investasi mencapai 70% dari target yang ditetapkan.
4. Terciptanya kemudahan investasi daerah 118,65% dari target yang ditetapkan.

Hasil penghitungan efisiensi diketahui bahwa penggunaan sumber daya dalam mencapai target indikator kinerja sesuai perjanjian kinerja yang telah ditetapkan seluruhnya mencapai kategori efisien. Keberhasilan capaian kinerja tahun 2019 di dukung oleh program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik



- b. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
 - c. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
 - d. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
 - e. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - f. Penyediaan Alat Tulis Kantor
 - g. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - h. Penyediaan Komponen instalasi Listrik / Penerangan
 - i. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
 - j. Penyediaan Makanan dan Minuman
 - k. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
 - l. Rapat-Rapat Koordinasi dan konsultasi Dalam Daerah
 - m. Penunjang Operasional Perencanaan dan Pelaporan
- 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - a. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
 - b. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
- 3. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
 - a. Pelayanan Penanaman Modal
 - b. Pengembangan Sistem Informasi Perizinan dan Penanaman Modal
 - c. Koordinasi Bidang Penanaman Modal
 - d. Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal
- 4. Program Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Perizinan
 - a. Operasional Penyelenggaraan Perizinan
 - b. Monitoring dan evaluasi pelayanan perizinan
 - c. Survey Indeks Kepuasan Masyarakat
 - d. Penyelesaian Permasalahan Pengaduan Perizinan
 - e. Sosialisasi Peraturan Perizinan dan Non Perizinan
 - f. Pengembangan Sistem Pelayanan Perizinan yang berbasis teknologi
- 5. Program Peningkatan Promosi dan kerjasama Investasi
 - a. Promosi Investasi di Dalam Negeri
 - b. Pelayanan Kerjasama Investasi
 - c. Pendataan Realisasi Investasi non Fasilitas Rumah Tangga
 - d. Publikasi Perizinan, Penanaman Modal dan Peluang Investasi



Sementara itu, total anggaran untuk mewujudkan kinerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2019 sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan adalah sebesar Rp. 1.470.715.800 dengan realisasi sebesar Rp. 1.449.598.668 atau sebesar 98,56%.

Langkah-langkah yang akan dilakukan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dalam upaya meningkatkan kinerjanya di masa mendatang adalah :

1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan DMPPTSP
2. Meningkatkan kompetensi aparatur DMPPTSP sesuai dengan bidangnya
3. Melakukan penataan regulasi investasi daerah
4. Meningkatkan koordinasi dengan dinas teknis dan dunia usaha untuk menjaga hubungan yang harmonis dan strategis
5. Melakukan Pemetaan Investasi Daerah



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Terselenggaranya “ *Good Governance* “ merupakan persyaratan bagi setiap pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa. Dalam rangka itu maka diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan legetimasi, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berguna, berhasil guna dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sejalan dengan itu dalam rangka pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan yang tepat, jelas, terukur dan akuntabel, maka Instansi Pemerintah di tingkat pusat maupun daerah harus menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014, tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dimaksud untuk memberikan gambaran yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggung jawabkan tentang kinerja suatu instansi pemerintah. Hasilnya diharapkan dapat membantu pimpinan dan seluruh jajaran instansi pemerintah dalam mencermati berbagai permasalahan sebagai bahan acuan dalam menyusun program ditahun berikutnya, dengan demikian program di tahun mendatang dapat disusun lebih fokus, efektif, efisien, terukur, transparan dan dapat dipertanggung jawabkan.

A.1. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Laporan Kinerja adalah:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;



2. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Laporan Kinerja Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pelaporan LAKIP dan Penetapan Kinerja;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Review atas Laporan Kinerja;
5. Keputusan Kepala LAN Nomor : 589/IX/6/4/1999 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Dinas Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
7. Peraturan Bupati Pesisir Selatan nomor 95 tahun 2018 Tanggal 28 Desember 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun anggaran 2019.

A.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah:

1. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumberdaya.
2. Sebagai alat untuk mengetahui dan memperbaiki/menyempurnakan kelemahan/kekurangan dalam pencapaian sasaran Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya;
3. Sebagai sarana pemantau dan peringatan dini terjadinya penyimpangan dalam menjalankan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan.



A.3. Gambaran Umum

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan merupakan unsur penunjang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang meliputi sebagai berikut :

- a. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu merupakan unsure pelaksana urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.
- b. Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

A.4. Tugas Pokok

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas pokok yaitu :

- a. Perumusan kebijaksanaan teknis penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan berdasarkan kewenangan yang dilimpahkan Bupati dalam rangka urusan penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan berdasarkan kewenangan yang dilimpahkan Bupati dalam rangka urusan penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu;
- c. Pembinaan, pelaksanaan tugas, evaluasi dan pengendalian penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan berdasarkan kewenangan yang dilimpahkan Bupati dalam rangka urusan penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu dan urusan penanaman modal; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

A.5. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati nomor 33 tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kabupaten Pesisir Selatan sesuai struktur organisasi dan tata kerja



terdiri dari 1 unit eselon II, 3 unit eselon III yang terdiri dari 1 sekretariat dan 3 Kepala Bidang dengan struktur organisasi sebagai berikut:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
3. Bidang Promosi dan Kerjasama Investasi, membawahi;
 - a. Sub Bidang Promosi
 - b. Sub Bidang Kerjasama Investasi
 - c. Sub Bidang Data dan Informasi
4. Bidang Penanaman Modal dan Pengendalian, membawahi;
 - a. Sub Bidang Fasilitas Penanaman Modal
 - b. Sub Bidang Pengendalian Penanaman Modal
 - c. Sub Bidang Advokasi
5. Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu membawahi;
 - a. Sub Bidang Perizinan Non perizinan
 - b. Sub Bidang Pengawasan dan Pengaduan
 - c. Sub Bidang Pelaporan Perizinan

B. STRUKTUR ORGANISASI

Jumlah pegawai DPMP2TSP kabupaten Pesisir selatan pada tahun 2019 adalah sebanyak 21 orang. Keadaan pegawai dirinci berdasarkan golongan, eselon dan tingkat pendidikan dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Jumlah pegawai berdasarkan jenis kelamin
 - Laki-laki : 10 orang
 - Perempuan : 11 orang
- b. Jumlah pegawai berdasarkan golongan
 - Golongan IV : 7 orang
 - Golongan III : 13 orang
 - Golongan II : 1 orang



c. Jumlah pegawai berdasarkan jabatan struktural

- Eselon II : 1 orang
- Eselon III : 4 orang
- Eselon IV : 11 orang
- Fungsional umum : 5 orang

d. Jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan

- S2 : 7 orang
- S1 : 11 orang
- Diploma : 1 orang
- SLTA : 2 orang

Komposisi Sumber Daya Manusia (SDM) di atas didukung oleh jumlah pegawai yang belum memadai. Namun, jika dianalisa berdasarkan tingkat pendidikan, sumberdaya yang dimiliki dapat dikategorikan sebagai komposisi yang baik.

C. KEPEGAWAIAN DAN TUPOKSI

Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Pesisir Selatan terdiri dari :

a. Kepala Dinas

Merumuskan, menyelenggarakan, membina dan mengevaluasi urusan pemerintah Daerah berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan pada bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan

b. Sekretaris

1. Membantu Kepala Dinas mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja dan kegiatan bidang-bidang
2. Memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan/unit kerja di lingkungan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sekretaris membawahi :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Mempunyai tugas pokok dan fungsi yaitu Membantu Sekretaris merencanakan, menyiapkan bahan, mengolah dan melaksanakan



pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkungan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu

2. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan

Mempunyai tugas pokok dan fungsi Membantu Sekretaris merencanakan, menyusun, mengolah rencana Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan di lingkungan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Bidang – bidang yang terdiri dari 3 (Tiga) bidang yaitu

1. Bidang Promosi dan Kerjasama Investasi

Bidang Promosi dan Kerjasama Investasi mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan promosi daerah serta melakukan pendataan potensi Investasi melalui media cetak maupun elektronik. Bidang ini membawahi 3 (tiga) seksi yaitu

a. Sub Bidang Promosi

Sub Bidang Promosi mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan promosi daerah baik melalui media cetak maupun elektronik serta mengikuti Pameran-pameran baik dalam Daerah maupun luar daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

b. Sub Bidang Kerjasama Investasi

Sub Bidang Kerjasama Investasi mempunyai tugas pokok dan fungsi Menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan Kerjasama Investasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan

c. Sub Bidang Data dan Informasi

Sub Bidang Data dan Informasi mempunyai tugas pokok dan fungsi menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan Data dan Informasi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan

2. Bidang Penanaman Modal dan Pengendalian

Bidang Penanaman Modal mempunyai tugas pokok dan fungsi membantu Kepala Dinas menyusun perumusan dan pelaksanaan kebijakan Bidang Penanaman Modal. Bidang ini membawahi 3 (tiga) seksi yaitu

a. Sub Bidang Fasilitas Penanaman Modal



Sub Bidang Fasilitas Penanaman Modal mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria serta melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

b. Sub Bidang Pengendalian Penanaman Modal

Sub Bidang Pengendalian Penanaman Modal mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria serta melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di seksi Pengendalian Penanaman Modal

c. Sub Bidang Advokasi

Sub Bidang Advokasi mempunyai tugas pokok dan fungsi menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang penanaman modal.

3. Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu

Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas pokok dan fungsi menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu. Bidang ini membawahi 3 (tiga) seksi yaitu

a. Sub Bidang Perizinan Non perizinan

Sub Bidang Perizinan Non perizinan mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan perumusan dan kebijakan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis.

b. Sub Bidang Pengawasan dan Pengaduan

Sub Bidang Perizinan Non perizinan mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan perumusan dan kebijakan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis di seksi Pengawasan dan Pengaduan

c. Sub Bidang Pelaporan Perizinan

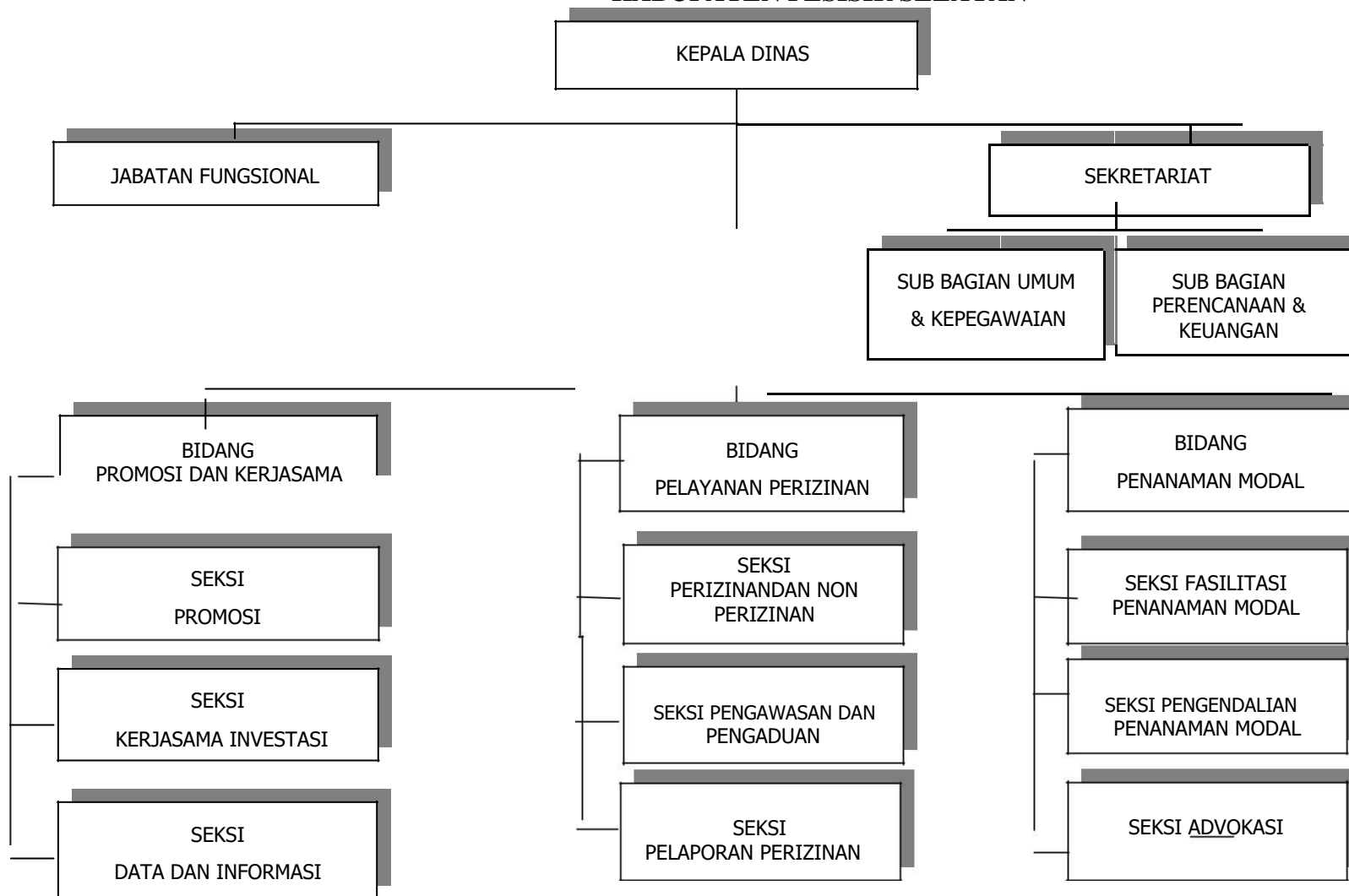
Sub Bidang Perizinan Non perizinan mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan perumusan dan kebijakan penyusunan



norma, standar, prosedur dan criteria serta pemberian bimbingan teknis di seksi Pelaporan Perizinan



**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PESISIR SELATAN**



D. SARANA DAN PRASARANA PENUNJANG

Selain didukung oleh SDM yang mencukupi, DPMPTSP kabupaten Pesisir selatan juga dilengkapi dengan fasilitas fisik. Berbagai fasilitas fisik tersebut merupakan aset negara yang dijadikan sebagai sarana pendukung untuk pelaksanaan program kerja DPMPTSP kabupaten Pesisir selatan. DPMPTSP kabupaten Pesisir selatan saat ini menempati gedung yang beralamat di H. Agus Salim No 1 Painan.

Aset dengan harga perolehan yang sesuai dengan neraca sebesar Rp. 1.112.230.617,- Aset tersebut terdiri dari Aset Lancar, Aset Tetap. Aset tetap dengan harga perolehan Rp. 1.110.707.617 yang terdiri dari tanah untuk bangunan gedung harga perolehannya Rp. 192.000.000,00, Peralatan dan Mesin dengan harga nilai perolehan 625.872.688,- yang terdiri dari golongan peralatan dan mesin terdiri dari alat angkutan darat bermotor dengan harga perolehan Rp. 157.089.000,- yang terdiri dari kendaraan motor penumpang, kendaraan bermotor beroda dua Alat Kantor dengan harga perolehan Rp. 109.197.637 yang terdiri dari Mesin ketik, alat penyimpang perlengkapan kantor, alat kantor lainnya. Untuk alat rumah tangga dengan harga perolehan Rp. 123.619.181.00 yang terdiri dari Meubiller, alat pengukur waktu, alat pendingin, alat rumah tangga lainnya. Untuk komputer dengan harga perolehan Rp. 180.181.138 yang terdiri dari Komputer unit jaringan personal komputer, peralatan komputer, Peralatan mini komputer, peralatan personal komputer. Untuk Meja dan kursi kerja/rapat pejabat dengan harga perolehan Rp. 27.458.520 yang terdiri dari Meja kerja pejabat, Kursi kerja pejabat, lemari dan arsip pejabat. Untuk alat studio dengan harga perolehan sebesar Rp. 23.754.712. yang terdiri dari peralatan studio visual. Untuk alat komunikasi dengan harga perolehan Rp. 2.525.000. Untuk peralatan pemancar dengan harga perolehan sebesar Rp. 2.047.500 yang terdiri dari Peralatan antenna UHF, alat-alat angkutan, alat bengkel dan alat ukur, alat kantor dan rumah tPeralatan antenna SHF/Parabola sedangkan Gedung dan Bangunan dengan harga perolehan sebesar Rp. 286.832.540 yang terdiri dari bangunan gedung tempat kerja, bangunan gedung tempat tinggal. Untuk jalan, irigasi, dan jaringan dengan nilai harga perolehan Rp. 3.002.389.- Jaringan Telepon sebesar Rp. 1.500.000,- sedangkan aset tetap lainnya adalah sebesar Rp. 3.000.000,- sebagaimana tabel 2.1 berikut:



Rekapitulasi Neraca barang inventaris/aset DMPPTSP Kabupaten Pesisir Selatan TA 2018 dan 2019

No. Urut	Golongan	Kode Bidang Barang	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang		Nilai Perolehan Th. 2019(Rp.)	Nilai Perolehan Th. 2018(Rp.) (Rp.)	Beban Penyusutan Tahun 2019	Keterangan
				Persil	Jumlah				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1			Aset Tetap			1.177.993.547,00	1.109.443.547,00	68.550.00,00	
		02	Tanah	-	1	192.000.000,00	192.000.000,00	0	
		03	Peralatan dan Mesin	-	2	1.236.107.919,07	1.167.557.919,07	68550000	
		04	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	1	29.443.389,40	29.443.389,40	0	
		17	Gedung dan Bangunan	-	1	826.360.540,00	826.360.540,00	0	
		18	Aset tetap lainnya	-	1	3.000.000,00	3.000.000,00	0	
			Ekuitas dana			1.174.668.981,71	1.110.726.547,71	1.283.000,00	

E. Isu-Isu Strategis

Beberapa isu strategis DMPPTSP Kabupaten Pesisir Selatan untuk periode ini adalah sebagai berikut :

1. Masih belum terwujudnya jaminan stabilitas politik, keamanan dan penegakan hukum yang pasti dan konsisten. Faktor ini berpotensi menjadi penghambat Investor dalam melirik Kabupaten Pesisir Selatan sebagai tujuan Investasi.
2. Regulasi yang masih tumpang tindih berkaitan dengan penanaman modal. Kepastian regulasi akan memudahkan investor untuk berinvestasi karena telah ada regulasi yang dapat dijadikan sebagai payung hukum untuk berinvestasi.
3. Perlunya meningkatkan standar pelayanan optimal dan mekanisme kerja pelayanan satu pintu.
4. Diperlukannya kebijakan yang terintegrasi dengan potensi dan daya saing unggulan.
5. Kurangnya kendaraan operasional untuk mendukung pencapaian target pemungutan IMB.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategik Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan dimaksudkan sebagai alat kendali dan tolak ukur penyelenggara pembangunan dibidang Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan serta untuk penilaian keberhasilan pada setiap kegiatan. Renstra sebagai alat bagi manajemen untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah selaras dengan upaya pencapaian visi, misi dan tujuan / sasaran strategik.

1. Visi dan Misi

1.1 Visi

Visi merupakan pandangan jauh kedepan, kemana dan bagaimana instansi pemerintah harus dibina dan berkembang agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi tidak lain adalah suatu gambaran yang menantang tentang kerangka masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah. Dengan mengacu pada batasan tersebut, Visi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan sebagai berikut :

“Meningkatnya Pelayanan Perizinan untuk menarik Investor di Kab. Pesisir Selatan”

1.2 MISI

Untuk memenuhi Visi tersebut, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan mencanangkan misi sebagai berikut:

1. Menyiapkan sarana dan prasarana pelayanan yang lebih baik di bidang perizinan.
2. Melakukan koordinasi dan integritas dengan SKPD teknis terkait, dalam proses pemberian izin secara terpadu dan berkesinambungan.



3. Menyelenggarakan teknis pelayanan dengan mudah, cepat, transparan, dan berkapastian hukum.
4. Mempermudah masyarakat mengakses informasi dalam layanan satu pintu (*one stop service*).
5. Mengembangkan dan mempromosikan potensi daerah menjadi potensi unggulan yang mampu menarik investor.
6. Meningkatkan pelayanan perizinan melalui aplikasi yang terintegrasi pada kegiatan seperti OSS (Oline Single Submission)

II. Tujuan, dan Sasaran

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan menetapkan tujuan stratejik berdasarkan visi, misi dan faktor-faktor kunci keberhasilan, tujuan dan sasaran stratejik yang diterapkan dapat diuraikan sebagai berikut:

2.1 Tujuan :

Maka berdasarkan hal tersebut, diterapkan tujuan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik.
2. Melakukan penyederhanaan persyaratan, transparansi biaya dan kejelasan lamanya waktu pengurusan perizinan.
3. Melaksanakan pelayanan pemberian perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Melaksanakan penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi perizinan dan non perizinan dengan mengacu pada prinsip koordinasi, integritas, sinkronisasi dan keamanan berkas.
5. Terciptanya iklim investasi yang sehat dan semakin meningkatnya investasi ke daerah.

2.2. Sasaran

Terwujudnya kelancaran administrasi dalam rangka peningkatan investasi penanaman modal baik PMDN maupun PMA, yang sasarannya adalah peningkatan pelayanan bidang penanaman modal, perizinan dan non perizinan yang menjadi



kewenangan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan, sesuai dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 23 Tahun 2013, maupun perubahannya No. 19 Tahun 2014, dan Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Urusan Pemerintah Daerah Bidang Pelayanan Penanaman Modal, Perizinan dan non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan, serta mempromosikan kepada investor untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Pesisir Selatan. Adapun tujuan, visi dan misi serta sasaran DPMPPTSP dapat dilihat pada table 2.1 berikut ini :

TABEL 2.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DPMP2TSP Kabupaten Pesisir Selatan

No	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	5	3	8	9	10	11	12	13
1	Meningkatnya Pelayanan Perizinan untuk menarik Investor di Kab. Pesisir Selatan		Jumlah Realisasi Investasi di Daerah (juta)	160.000	170.000	180.000	190.000	200.000	210.000
		Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Terwujudnya Iklim Investasi Yang Kondusif	Peningkatan Jumlah Investor yang Berinvestasi (juta)	160.000	170.000	180.000	190.000	200.000	210.000
		Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan dan Kepegawaian	Persentase Pelaporan yang selaras dengan Renstra dan RPJM	100%	100%	100%	100%	100%	100%

B. Rencana Kinerja

Rencana Kinerja ini merupakan penjabaran target kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun pelaksanaan. Target Kinerja ini menunjukkan nilai kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategik maupun tingkat kegiatan, dan merupakan pembanding bagi proses pengukuran keberhasilan efisiensi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.



Sesuai ketentuan Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan perizinan Terpadu Satu Pintu Tahun 2019 mengacu pada Rencana Strategi Tahun 2016-2021 yang secara garis besar Perjanjian Kinerja tahun 2019 meliputi Sasaran Strategi yaitu ***Meningkatnya Pelayanan Perizinan untuk menarik Investor di Kab. Pesisir Selatan*** dengan indikator *Jumlah Realisasi Investasi di Daerah..* Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan sejak Tahun 2008 telah menyusun konsep pelayanan terpadu satu pintu dengan melayani 120 jenis perizinan, jumlah izin yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan dan Perizinan pada Tahun 2018 adalah sebanyak 4.448 buah izin sementara ditahun 2019 sebanyak 5456 izin dan diharapkan dapat meningkat di tahun 2020. Berikut Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 sebagaimana yang telah ditetapkan secara berjenjang (Cascading) mulai dari Eselon II, eselon III dan Eselon IV seperti table 2.2 berikut ini :

Tabel 2.2
PERJANJIAN KERJA TAHUN 2018
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PESISIR SELATAN

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN
	2	3	4	5	6
1	Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan	a. Indeks Kepuasan Masyarakat	100%	Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Perizinan 1. Survey Indeks Kepuasan Masyarakat 2. Operasional Penyelenggara Perizinan. 3. Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Perizinan. 4. Penyelesaian Permasalahan Pengaduan Perizinan 5. Sosialisasi Peraturan Perizinan dan Non Perizinan	243.049.500 32.588.500 111.033.000 75.044.000 24.384.000 0
2	Terwujudnya Iklim Investasi yang Kondusif	a. Peningkatan Jumlah Investor yang	190.000	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	183.271.600



		Berinvestasi (juta)		1. Koordinasi Bidang Penanaman Modal.	23.209.000
				2. Pelayanan Penanaman Modal.	55.283.600
				3. Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal	45.792.900
				4. Pengembangan Sistem Pelayanan Perizinan yang berbasis teknologi	58.986.100
				Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	247.403.400
				1. Pelayanan Kerjasama Investasi	54.629.400
				2. Promosi Investasi Di Dalam Negeri	161.161.500
				3. Pendataan Realisasi Investasi Non Fasilitas dan Rumah Tangga	31.612.500
	Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan dan Kepegawaian	b. Persentase Pelaporan yang selaras dengan Renstra dan RPJM	100%	Pelayanan Administrasi Perkantoran	
				1. Penunjang Operasional Perencanaan dan Pelaporan	39.972.800
				TOTAL	713.697.300

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Utama
Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2016 – 2021

N O	SASARAN STRATEGIS / KINERJA UTAMA / TUJUAN / OUTCOME	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET						SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				2016	2017	2018	2019	2020	2021		
1	Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat	$\frac{\text{Jumlah responden yang merasa puas}}{\text{Jumlah responden yang Mengurus Izin}} \times 100$	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kuisisioner dan kotak tingkat kepuasan pemohon	Bidang Pelayanan Perizinan
2	Terwujudnya Iklim Investasi Yang Kondusif	Peningkatan Jumlah Investor yang Berinvestasi	Jumlah Investasi PMA, PMDN, dan PMDN Non Fasilitas tahun evaluasi + Jumlah Investasi PMA, PMDN dan PMDN Non Fasilitas Tahun sebelumnya (juta)	160.000	170.000	180.000	190.000	200.000	210.000	Laporan Jumlah Investor per tahun	Bidang Penanam Modal
3	Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan dan Kepegawaian	Persentase Pelaporan yang selaras dengan Renstra dan RPJM	$\frac{\text{Jumlah Pelaporan yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Pelaporan yang}} \times 100$	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Sakip dan Lakip OPD	Sekretariat OPD



Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Instansi Pemerintah. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan juga melakukan review terhadap Indikator Kinerja Utama, baik tingkat Pemerintah Daerah maupun tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah, dalam melakukan review dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu – isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Adapun penetapan target Indikator Kinerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 – 2021 dapat dilihat pada tabel 2.1 diatas.



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA SASARAN

Akuntabilitas Kinerja merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, adapun uraian Akuntabilitas Kinerja Dinas Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1.
Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2019

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN (%)
1	Peningkatan Pelayanan Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat	200 responden	175 responden	87,5%	Program Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Perizinan			
						Survey Indeks Kepuasan Masyarakat	32,588,500	31,957,400	98,06
						Operasional Penyelenggara Perizinan	111,033,000	110,676,852	99,68
						Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Perizinan	75,044,000	74,421,100	99,17
						Penyelesaian Permasalahan Pengaduan Perizinan	24,384,000	23,974,600	98,32
						Sosialisasi Peraturan Perizinan dan Non Perizinan	0	0	Efisiensi anggaran
2	Terwujudnya Iklim Investasi yang Kondusif	Peningkatan jumlah investor yang berinvestasi	190.000,000,000	525.484,275,232	276,57%	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi			
						Promosi Investasi di Dalam Negeri dan Luar Negeri	161,161,500	159,938,065	99,24
						Pelayanan Kerjasama Investasi	54,629,400	50,432,700	92,32
						Pendataan realisasi Investasi Non Fasilitas dan Realisasi Investasi	31,612,500	30,611,750	96,83
						Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi			
						Pelayanan Penanaman Modal	55,283,600	55,201,200	99,85
						Pengawasan dan pengendalian penanaman modal	45,792,900	45,735,450	99,87



						Koordinasi Bidang Penanaman Modal	23,209,000	22,723,650	97,91
						Pengembangan Sistem Pelayanan Perizinan yang berbasis teknologi	58,986,100	55,029,269	93,29
3	Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan dan Kepegawaian	Persentase Pelaporan yang selaras dengan Renstra dan RPJM	100%	100%	100%	PROG. PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN			
						Penunjang Operasional Perencanaan dan Pelaporan	39,972,800	39,941,400	99,92

1. Analisa Capaian Kinerja per sasaran

Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja pada dokumen penetapan kinerja. Pada tahun anggaran (APBD) 2019 DPMPTSP telah melaksanakan kegiatan strategis untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan sasaran strategis. Penilaian capaian kinerja menggunakan rumus :

- Apabila semakin tinggi realisasi akan menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi akan menunjukkan rendahnya kinerja.

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100$$

Capaian kinerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan sesuai dengan pengukuran target tahun 2019 disajikan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir yang merupakan target jangka menengah. Sedangkan evaluasi capaian dan akuntabilitas kinerja meliputi analisis penyebab keberhasilan/kegagalan, analisis efisiensi penggunaan sumber daya dan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan guna memberikan gambaran efektifitas dan efisiensi pencapaian target kinerja. Secara rinci capaian masing-masing indikator kinerja sasaran tahun 2019 adalah sebagai berikut :



TABEL 3.2
CAPAIAN KINERJA PER SASARAN DPMPTSP Tahun 2019

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	responden	175 responden	200 responden	87,5%
2	Peningkatan Jumlah Investor yang Berinvestasi	Investasi	190.000.000.000	525,484,275,232	276,57%
3	Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan dan Kepegawaian	Pelaporan	100%	100%	100%

Dari table 3.2 dapat dilihat bahwa target yang telah dicapai oleh DPMPTSP Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2019 untuk tingkat kepuasan masyarakat perlu ditingkatkan dari target 200 responden, sementara untuk jumlah investor sudah melebihi target yaitu sebesar 276,57% dan diharapkan di tahun 2020 dapat melebihi dari tahun 2019.

TABEL 3.3
REALISASI DAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PENILAIAN DPMPTSP TAHUN 2017 DAN 2018

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI			CAPAIAN (%)		
			2017	2018	2019	2017	2018	2019
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	responden	150 responden	165 responden	150 responden	100	82,5	87,5%
2	Peningkatan Jumlah Investor yang Berinvestasi	Investasi	169.056.000.000	442,868,583,761	525,484,275,232	99,44	246,04%	276,57%
3	Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan dan Kepegawaian	Pelaporan	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Dari table 3.3 dapat dilihat pada target tingkat kepuasan masyarakat meningkat dari 170 responden tahun sebelumnya menjadi 175 responden dengan pencapaian 87,5%, tahun 2018 mencapai 82,5% tahun, sementara target investor juga meningkat mencapai 276,57% dari target yang ditetapkan tahun 2019.



2. Faktor pendukung dan penghambat pencapaian Kinerja

Berdasarkan perencanaan strategis yang telah disusun sebelumnya, maka dipandang perlu bagi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan untuk melakukan evaluasi secara mandiri terhadap faktor pendukung maupun penghambat pencapaian kinerja yang dilaksanakan oleh masing-masing bidang yang ada, maka diambil langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Penyelesaian pelayanan perizinan tidak melebihi standar waktu yang telah ditentukan (berbelit-belit).
- b. Biaya tidak melebihi dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- c. Prosedur pelayanan dapat ditelusuri dan diketahui setiap tahapan pemberian perizinan dan non perizinan.
- d. Mengurangi berkas kelengkapan perizinan yang sama untuk dua atau lebih permohonan perizinan.
- e. Pembebasan biaya pengurusan perizinan untuk semua izin usaha kecuali IMB
- f. Pemberian informasi kepada masyarakat untuk memperoleh informasi dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pelayanan
- g. Kurangnya Koordinasi dengan OPD terkait sehingga informasi persyaratan tidak sama
- h. Kesulitan untuk memantau perkembangan perusahaan disebabkan karena masih adanya investor yang tidak memenuhi kewajibannya untuk melaporkan kegiatan perusahaannya
- i. Keterbatasan data dan informasi yang diperoleh dalam upaya pengawasan dan pengendalian Perusahaan

3. Data-data pendukung pencapaian kinerja

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan, pengukuran kinerja tahun 2019 ini dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :

1. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan Indikator Kinerja Badan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019, mencakup : proses indentifikasi, pengembangan, seleksi dan konsultasi tentang indikator kinerja atau ukuran



kinerja sebagai alat ukur keberhasilan program/kegiatan, sasaran, tujuan dan misi/visi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan.

2. Pengumpulan Data Kinerja

Pengumpulan Data Kinerja untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu dan konsisten yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja instansi pemerintah, efisiensi dan efektivitas.

3. Metode / Cara Pengukuran Kinerja

Pengukuran Kinerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan yang memiliki tupoksi dalam hal Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan memiliki enam program utama dan dua strategis terkait pelayanan publik, capaian indikator kinerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan didapat melalui :

- Perbandingan rencana dan realisasi
- Perbandingan dengan perbandingan lain (tahun lalu, standar benchmark)
- Performance gap analisis : menganalisis capaian indikator kinerja dan mengenali dan menggali sebab-sebab tidak tercapainya target, meneliti gap (beda) yang mencolok.
- Meneliti apakah capaian tersebut menggambarkan keberhasilan, dan kembali lagi memikirkan apakah indikator kinerja telah tepat.

B. Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan

Urusan Penanaman Modal dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu melalui 6 (Enam) Program dan 28 (Dua puluh delapan) Kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 1,470,715,800,- dan terealisasi sebesar Rp. 1,449,589,668 ,- atau 98,56 % dengan rincian sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini dilaksanakan melalui 12 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 610,188,800 ,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 602,689,458 ,- (98,77%). Tidak ada kendala dalam pelaksanaan program/kegiatan ini,

2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

Program ini dilaksanakan melalui 2 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 120,526,000 ,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 120,232,724 ,- (99,76%). Fisik



kegiatan sudah terealisasi 100%. Tidak ada kendala dalam pelaksanaan program/kegiatan ini, tidak tercapainya 100% realisasi keuangan disebabkan adanya kelebihan dari belanja modal.

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program ini dilaksanakan melalui 1 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.0,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.0,- (0%). Kegiatan ini tidak terlaksana dikarenakan efisiensi anggaran

4. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi.

Program ini memiliki pagu anggaran Rp. 124,285,500 ,- dengan realisasi Rp. 123,660,300,- persentase keuangan 99,50%, yang dananya bersumber dari APBD Kabupaten Pesisir Selatan. Hasil/keluarannya berupa Pendataan Realisasi Investasi Non Fasilitas dan Rumah Tangga ke 15 Kecamatan, terlaksananya koordinasi Penanaman Modal ke BKPM RI dan BKP Provinsi, Terlaksananya Operasional Tim Task Force Investasi Penanaman Modal, terlaksananya Pelayanan Penanaman Modal dan Terlaksananya Penyusunan Buku Data Perkembangan Investasi.

5. Program Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Perizinan.

Program ini memiliki pagu anggaran Rp.302,035,600,- dengan realisasi Rp.296,059,221 ,- persentase keuangan 98,02 %, yang dananya bersumber dari APBD Kabupaten Pesisir Selatan. Hasil/keluarannya berupa peningkatan pelayanan publik bidang perizinan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP).

6. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

Program ini dilaksanakan melalui 3 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 247,403,400 ,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 240,982,515 ,- (97,40%). Belum tercapainya realisasi keuangan disebabkan adanya sisa belanja yang harus disetorken kembali ke kas daerah



C. Target dan Realisasi Pendapatan (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang di target kepada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan hanya Retribusi dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), adapun target dan realisasinya selama tahun 2019 sebagai berikut:

TABEL 3.4
REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
TAHUN 2019

No.	Jenis Izin	Tahun 2019		
		Target	Realisasi	%
1.	IMB	1000,000,000	950,253,847	95,03%
2.				
	Jumlah	1000,000,000	950,253,847	95,03%

Dari tabel diatas terlihat realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dimana realisasi penerimaan tahun 2019 sebesar Rp. 950253847 atau 95,03%. dan diharapkan meningkat pada tahun 2020.

TABEL 3.5
Sasaran, Anggaran, Realisasi dan Capaian keuangan DPMPTSP 2019

No	PROGRAM/KEGIATAN/ RINCIAN KEGIATAN	Jumlah Dana	Jumlah Pencairan Dana SP2D (Rp.)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)	
				Jumlah	%	s/d	s/d
				Real Keu (Rp.)	Keu	bl lalu	bl ini
1	2	3	5	6	7	8	9
XI		1,470,715,800	1,449,598,668	1,449,598,668	98.56	98.56	98.56
I	PROG. PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	610,188,800	602,689,458	602,689,458	98.77	98.77	98.77
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	40,320,000	36,034,228	36,034,228	89.37	81.47	89.37
a.	Belanja Barang dan Jasa	40,320,000	36,034,228	36,034,228	89.37	81.47	89.37
2	Penyediaan jasa administrasi keuangan	84,100,000	82,700,000	82,700,000	98.34	86.09	98.34
a.	Belanja Pegawai	84,100,000	82,700,000	82,700,000	98.34	86.09	98.34
3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	151,518,500	151,496,000	151,496,000	99.99	86.13	99.99
a.	Honorarium Pegawai	136,500,000	136,500,000	136,500,000	100.00	84.62	100.00
b.	Belanja Barang dan Jasa	15,018,500	14,996,000	14,996,000	99.85	99.85	99.85
4	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	15,800,000	15,800,000	15,800,000	100.00	100.00	100.00
a.	Belanja Barang dan Jasa	15,800,000	15,800,000	15,800,000	100.00	100.00	100.00



LAPORAN KINERJA (LKj)
DINAS DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU TAHUN 2018

4	Penyediaan Jasa Peralatan dan Penglengkapan Kantor	36,100,000	35,800,000	35,800,000	99.17	97.41	99.17
a.	Belanja Barang dan Jasa	36,100,000	35,800,000	35,800,000	99.17	97.41	99.17
						-	-
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	32,040,000	32,024,000	32,024,000	99.95	99.95	99.95
a.	Belanja Barang dan Jasa	32,040,000	32,024,000	32,024,000	99.95	99.95	99.95
						-	-
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	23,922,000	23,865,250	23,865,250	99.76	99.76	99.76
a.	Belanja Barang dan Jasa	23,922,000	23,865,250	23,865,250	99.76	99.76	99.76
						-	-
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	18,665,500	18,531,000	18,531,000	99.28	99.28	99.28
a.	Belanja Barang dan Jasa	18,665,500	18,531,000	18,531,000	99.28	99.28	99.28
						-	-
8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	18,900,000	18,240,000	18,240,000	96.51	91.11	96.51
a.	Belanja Barang dan Jasa	18,900,000	18,240,000	18,240,000	96.51	91.11	96.51
						-	-
9	Penyediaan Makanan dan Minuman	26,050,000	25,742,500	25,742,500	98.82	96.40	98.82
a.	Belanja barang dan jasa	26,050,000	25,742,500	25,742,500	98.82	96.40	98.82
						-	-
10	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	43,675,000	43,485,080	43,485,080	99.57	99.57	99.57
b.	Belanja barang dan jasa	43,675,000	43,485,080	43,485,080	99.57	99.57	99.57
						-	-
11	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	79,125,000	79,030,000	79,030,000	99.88	94.70	99.88
a.	Belanja Barang dan Jasa	79,125,000	79,030,000	79,030,000	99.88	94.70	99.88
						-	-
12	Penunjang Operasional Perencanaan dan Pelaporan	39,972,800	39,941,400	39,941,400	99.92	99.92	99.92
a.	Belanja Barang dan Jasa	39,972,800	39,941,400	39,941,400	99.92	99.92	99.92
						-	-
2	PROG. PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	120,526,000	120,232,724	120,232,724	99.76	81.36	99.76
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	23,850,000	23,832,272	23,832,272	99.93	99.93	99.93
a.	Belanja Barang dan Jasa	23,850,000	23,832,272	23,832,272	99.93	99.93	99.93
b.	Belanja Modal	-	-	-	-	-	-
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	96,676,000	96,400,452	96,400,452	99.71	99.71	99.71
a.	Belanja Barang dan Jasa	96,676,000	96,400,452	96,400,452	99.71	99.71	99.71
						-	-
3	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	-	-	-	-	-	-
a.	Belanja Barang dan Jasa	-	-	-	-	-	-
b.	Belanja Modal	-	-	-	-	-	-
4	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	-	-	-	-	-	-
a.	Belanja Modal pengadaan kendaraan Dinas	-	-	-	-	-	-
3	PROG. PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	-	-	-	-	-	-
1	Pendidikan Formal	-	-	-	-	-	-
a.	Belanja barang dan jasa	-	-	-	-	-	-
4	PROG. PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI	247,403,400	240,982,515	240,982,515	97.40	90.94	97.40
1	Promosi Investasi di Dalam Negeri	161,161,500	159,938,065	159,938,065	99.24	97.44	99.24
a.	Belanja Pegawai	13,200,000	13,200,000	13,200,000	100.00	91.67	100.00



LAPORAN KINERJA (LKj)
DINAS DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU TAHUN 2018

		b. Belanja Barang dan Jasa	147,961,500	146,738,065	146,738,065	99.17	97.96	99.17
	2	Pelayanan kerjasama Investasi	54,629,400	50,432,700	50,432,700	92.32	80.50	92.32
		a. Belanja Pegawai	2,500,000	-	-	-	-	-
		b. Belanja Barang dan Jasa	52,129,400	50,432,700	50,432,700	96.75	90.43	96.75
	3	Pendataan Realisasi Investasi Non Fasilitas dan RT	31,612,500	30,611,750	30,611,750	96.83	75.81	96.83
		a. Belanja pegawai	6,000,000	6,000,000	6,000,000	100.00	83.33	100.00
		b. Belanja barang dan jasa	25,612,500	24,611,750	24,611,750	96.09	74.05	96.09
5	PROG. PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN REALISASI INVESTASI		124,285,500	123,660,300	123,660,300	99.50	96.24	99.50
	1	Pelayanan Penanaman Modal	55,283,600	55,201,200	55,201,200	99.85	94.33	99.85
		a. Belanja pegawai	13,200,000	13,200,000	13,200,000	100.00	83.33	100.00
		b. Belanja barang dan jasa	42,083,600	42,001,200	42,001,200	99.80	97.78	99.80
	2	Pengembangan sistem informasi perizinan dan penanaman	-	-	-	-	-	-
		a. Belanja pegawai	-	-	-	-	-	-
		b. Belanja barang dan jasa	-	-	-	-	-	-
	3	Koordinasi bidang penanaman modal	23,209,000	22,723,650	22,723,650	97.91	97.91	97.91
		a. Honorarium pelaksanaan kegiatan	-	-	-	-	-	-
		b. Belanja barang dan jasa	23,209,000	22,723,650	22,723,650	97.91	97.91	97.91
	4	Pengawasan dan pengendalian penanaman modal	45,792,900	45,735,450	45,735,450	99.87	97.69	99.87
		a. Honorarium pelaksanaan kegiatan	6,000,000	6,000,000	6,000,000	100.00	83.33	100.00
		a. Belanja Barang dan Jasa	39,792,900	39,735,450	39,735,450	99.86	99.86	99.86
6	PROG. PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK BIDANG PERIZINAN		302,035,600	362,033,671	362,033,671	119.86	77.73	119.86
	1	Operasional penyelenggara perizinan	111,033,000	110,676,852	110,676,852	99.68	92.94	99.68
		a. Belanja Pegawai	6,000,000	6,000,000	6,000,000	100.00	91.67	100.00
		b. Belanja Barang dan Jasa	105,033,000	104,676,852	104,676,852	99.66	93.02	99.66
	2	Monitoring dan evaluasi pelayanan perizinan	75,044,000	74,421,100	74,421,100	99.17	84.03	99.17
		a. Belanja Pegawai	13,200,000	13,200,000	13,200,000	100.00	91.67	100.00
		b. Belanja Barang dan Jasa	61,844,000	61,221,100	61,221,100	98.99	82.40	98.99
	3	Survey indeks kepuasan masyarakat	32,588,500	31,957,400	31,957,400	98.06	89.18	98.06
		a. Belanja Pegawai	6,000,000	6,000,000	6,000,000	100.00	91.67	100.00
		b. Belanja Barang dan Jasa	26,588,500	25,957,400	25,957,400	97.63	88.62	97.63
	4	Penyelesaian Permasalahan Pengaduan Perizinan	24,384,000	23,974,600	23,974,600	98.32	62.22	98.32
		a. Belanja Pegawai	-	-	-	-	-	-
		b. Belanja Barang dan Jasa	24,384,000	23,974,600	23,974,600	98.32	62.22	98.32
	5	Sosialisasi Peraturan Perizinan dan Non Perizinan	-	-	-	-	-	-
		a. Belanja Pegawai	-	-	-	-	-	-
		b. Belanja Barang dan Jasa	-	-	-	-	-	-
	6	Pengembangan Sistem Pelayanan Perizinan yang berbasis teknologi	58,986,100	55,029,269	55,029,269	93.29	80.26	93.29
		a. Belanja Pegawai	32,000,000	32,000,000	16,000,000	100.00	84.38	100.00
		b. Belanja Barang dan Jasa	26,986,100	23,029,269	10,106,269	85.34	75.38	85.34
	PROG. PENINGKATAN DAYA SAING PENANAMAN MODAL		66,276,500				-	
	1	Publikasi Perizinan, Penanaman Modal dan Peluang Investasi	66,276,500	65,974,450	65,974,450	99.54	45.66	99.54
		a. Belanja Pegawai	450,000	450,000	450,000	100.00	-	100.00



	b. Belanja Barang dan Jasa	33,076,500	32,774,450	32,774,450	99.09	91.50	99.09
	c. Belanja Modal	32,750,000	32,750,000	32,750,000	100.00	-	100.00
	JUMLAH	1,470,715,800	1,449,598,668	1,449,598,668	98.56	83.93	98.56

**Pencapaian Kinerja Pelayanan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Pesisir Selatan**

No	Indikator Kinerja	Target Renstra SKPD		Realisasi Capaian		Catatan Analisis
		2018	2019	2018	2019	
1	2	4	5	6		9
1.	Pelayanan sesuai SOP/Tepat Waktu	200	140	165	115	DPMPTSP
2.	Peningkatan jumlah investor yang berinvestasi (juta)	180.000	190.000	246,04%	183,56%	DPMPTSP
3.	Persentase sarana dan prasarana pelayanan perizinan yang memenuhi standar pelayanan	100	100	100	34,83%	DPMPTSP
4.	Persentase SDM yang telah sertifikasi	40%	40%	40%	20%	DPMPTSP
5.	penyelesaian izin investasi sesuai yang dikeluarkan	3,000	3,500	4.448	1,800	DPMPTSP



BAB IV PENUTUP

Reinventing Government yang merupakan konsep yang diadaptasi dari teori manajemen pada sektor swasta, merupakan paradigma baru bagi pemerintah dalam menciptakan birokrasi yang lebih efisien, lebih ramping, cepat tanggap terhadap kebutuhan pelanggan sebagaimana bisnis sektor swasta. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan sebagai salah satu penyangga reformasi Pelayanan Perizinan di Kabupaten Pesisir Selatan bertekad untuk menerapkan konsep *Reinventing Government* dengan berupaya melakukan transformasi sistem pemerintahan dari sistem yang birokratis ke arah sistem yang bertujuan untuk lebih mewirauksahkan birokrasi pemerintah atau dengan kata lain merubah fokus akuntabilitas dari orientasi pada masukan (*Inputs Oriented Accountability*) dan proses ke arah akuntabilitas pada hasil (*Results Oriented Accountability*).

Seiring dengan hal tersebut Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan dapat melaksanakan perizinan terpadu satu pintu, yang dimulai dari permohonan sampai dengan penerbitan izin kepada masyarakat dengan layanan yang lebih baik, untuk mengetahui keberhasilan SKPD dalam melaksanakan kegiatan tersebut maka dibuatlah Laporan Akuntabilitas Kinerja dengan harapan dapat menjadi bahan evaluasi kinerja bagi pihak yang membutuhkan. Sehingga dapat menjadi tolak ukur penyempurnaan dokumen perencanaan dan berbagai kebijakan untuk yang akan datang.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja ini kami susun, mudah-mudahan memberikan hasil sesuai dengan harapan. amin.

Painan, Desember 2019
Kepala Dinas

Drs. SUARDI.S, M.Si
NIP. 19610324 198603 1 004

